



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 26 Juli 2021

Halaman: 1

Modal Sudah Habis

SEBANYAK 10 toko di kawasan Malioboro dijual oleh pemiliknya karena terimbas kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat serta pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Koordinator Lapangan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY), KRT Karyanto Purbo Husodo mengungkapkan, pemilik terpaksa menjual tokonya lantaran sama sekali tak memiliki modal usaha. Mereka juga tidak sanggup melunasi utang di bank.

Terlebih akibat kebijakan PPKM Darurat ini pelaku usaha sama sekali tidak bisa mencari penghasilan sehingga mereka terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan maupun membayar ongkos operasional.

"Semakin banyak pemilik toko yang menjual tokonya oleh karena kehabisan modal dan bayar bunga di bank-bank. Oleh karena tidak mampu melunasi utang-utangnya. Ada 10 (pemilik)

● ke halaman 11

Modal Sudah

● Sambungan Hal 1

toko) yang tidak kuat," terang Karyanto, Minggu (25/7).

Karyanto menambahkan, di tengah situasi sulit, toko-toko juga harus memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Mulai dari membayar pajak penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selain itu toko juga harus menanggung biaya operasional seperti listrik, air, telepon, dan upah pekerja. "Lagi pula kalau kita sakit juga harus berobat ke dokter," terangnya.

Saat ini tercatat ada 9.850 staf yang bekerja di toko-toko sepanjang Jalan Malioboro dan Ahmad Yani. Sebagian besar mengalami perumahan karena kebijakan PPKM tak mengizinkan toko di luar sektor esensial untuk berjualan. "Itu belum termasuk keluarga saat ini dalam keadaan hidup tanpa penghasilan sama sekali," jelasnya.

Atas kondisi ini, Karyanto mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah yakni Pemda DIY untuk meringankan beban pemilik toko di kawasan ini. Dirinya pun meminta agar kebijakan PPKM dapat segera dicabut sehingga pemilik toko dapat kembali berjualan.

"Saya mewakili teman-teman PPMAY meminta dukungan pemerintah dalam hal ini bapak Gubernur DIY agar keluhan kita diperhatikan dan didukung oleh Pemda DIY. Mohon sekiranya bapak Gubernur DIY bisa membantu pihak toko-toko yang semakin lama semakin berat menjalani usahanya," tambahnya.

Menurutnya, keberadaan toko-toko di kawasan Malioboro menjadi penting. Sebab eksistensinya turut menyumbang kekhasan tersendiri bagi wilayah yang juga menjadi ikon kota Yogyakarta ini.

"Perkumpulan pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani sebagai ikon Yogya yang sebagai perkumpulan toko-toko sudah ada sejak toko-toko berada di Malioboro dan Ahmad Yani sejak lama," bebernya.

Jibaku

Rencana pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 tertunda lantaran pemerintah masih beribakat untuk menurunkan kasus positif Covid-19. Hal itu diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Beny Suharsono, yang menyatakan jika semua sektor perekonomian di DIY semakin terpuruk akibat pengendalian aktivitas oleh pemerintah.

Dalam rencana pembangunan daerah yang disepakati, seharusnya arah pembangunan tahun 2021 di DIY adalah menuju kepada pembangunan ekonomi. "Tetapi kami menyadari pandemi ini sangat berdampak kuat. Tahun 2021 upaya pembangunan kami sudah bergeser ke arah pembangunan ekonomi," katanya, kepada *Tribun Jogja*, Minggu (25/7).

Akan tetapi rencana tersebut tersisihkan karena pada awal Juli hingga pertengahan Juli 2021 kali ini trend Covid-19 di DIY terus meningkat. Sehingga beberapa rencana yang telah disusun terpaksa dihentikan, karena pemerintah masih fokus terhadap sektor kesehatan. "Jadi 2021 itu memang target pemulihan ekonomi. Beberapa kegiatan sudah dimulai, dan sekarang kesehatan lebih utama," terang dia.

Beny menyadari pertumbuhan ekonomi di DIY saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, karena pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak dapat mengoptimalkan produknya.

Selain itu dari sektor perhotelan juga menurutnya sedang kolaps karena tingkat hunian yang rendah. Terbaru, sebanyak 10 toko di kawasan Jalan Malioboro dijual oleh pemiliknya karena tak sanggup beroperasi di tengah badai pandemi. "Mengetahui itu, Pemda segera mengeluarkan bantuan, SK sudah ada. Karena dampak ini ada dua. Pertama dampak karena pandemi, yang kedua dampak karena PPKM Darurat," terang dia.

Fokus kesehatan

Jika sebelumnya pemerintah DIY berjalan beringan antara sektor ekonomi dan kesehatan, kali ini Beny menuturkan bahwa fokus utama dalam upaya penanganan pandemi saat ini lebih kepada penanganan kesehatan. "Karena dampak PPKM Darurat kesembuhan tinggi, tapi kematiannya juga meningkat. Dulu fokus dua-duanya ekonomi dan kesehatan, sekarang hanya kesehatan," terang dia.

Di tengah merosotnya pertumbuhan ekonomi, namun dikatakan olehnya ada beberapa sektor yang justru naik pesat khususnya di wilayah DIY. "Pertanian itu justru tumbuh, kemarin sampai 14 persen, kebutuhan listrik juga naik karena banyak yang WFH (work from home) kan," jelas Beny.

Sementara sektor ekonomi esensial yang terpuruk dikatakan Beny masih belum termonitor, karena pihaknya baru bersurat ke Bank Indonesia (BI) cabang DIY selaku tim penanggulangan inflasi daerah.

Kendati demikian, Pemda DIY sudah menyiapkan sejumlah relaksasi, di antaranya penghapusan denda pajak diperpanjang hingga Desember, selanjutnya subsidi kebutuhan listrik untuk kalangan menengah ke bawah dan pengusaha. (tro/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005